

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (HDI)
DI SULAWESI SELATAN**



Skripsi Oleh:

Zerlinda Salsabila

01021282126054

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (HDI)
DI SULAWESI SELATAN**

Disusun Oleh,

Nama : Zerlinda Salsabila
NIM : 01021282126054
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 16 April 2025



Dr. Hj. Anna Yullanita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* DI SULAWESI SELATAN

Disusun Oleh

Nama : Zerlinda Salsabila
Nim : 01021282126054
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan Bidang
Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 15 Mei 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 15 Juli 2025

Pembimbing

Penguji



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015



Dr. Yunisvita, S.E., M.Si
NIP. 197006292008012009

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 18-7-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zerlinda Salsabila
NIM : 01021282126054
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap
Human Development Index di Sulawesi Selatan.**

Pembimbing : Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si
Tanggal Ujian : 15 Mei 2025

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 15 Juli 2025

Pembuat pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 18-7-2025
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Zerlinda Salsabila
NIM. 01021282126054

MOTTO

“Hidupku adalah pilihanku. Menjadi siapa aku di masa yang akan datang adalah konsekuensi dari pilihanku sekarang.”

(Ambarita)

“Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu karenanya: kesehatan dan waktu luang.”

(HR. Bukhari)

“Adapun jika dia termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah), maka (baginya) kenikmatan dan kesenangan serta surga penuh kenikmatan”

(QS. Al-Waqi’ah: 88–89)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap *Human Development Index* di Sulawesi Selatan”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari berbagai kendala, namun berkat izin Allah SWT serta dukungan dan doa banyak pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait efektivitas alokasi anggaran sektor pendidikan dan kesehatan terhadap *Human Development Index*. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan, sehingga masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Indralaya, 15 Juli 2025



Zerlinda Salsabila
NIM. 01021282126054

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Semua hambatan tersebut dapat teratasi berkat doa, bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Azwardi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dr. Yunisvita, S.E., M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi.
6. Seluruh Dosen Ekonomi Pembangunan.
7. Ibu saya tercinta, Sri Juariah, atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah saya.
8. Teman-teman dan berbagai pihak yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Indralaya, 15 Juli 2025



Zerlinda Salsabila
NIM. 01021282126054

ABSTRAK

PENGARUH ALOKASI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP *HUMAN DEVELOPMENT INDEX* DI SULAWESI SELATAN

Oleh:

Zerlinda Salsabila; Anna Yulianita

Dalam pengelolaan keuangan daerah, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan komponen penting dalam penyediaan layanan dasar publik serta merupakan bentuk investasi langsung dalam pembangunan manusia yang tercermin melalui *Human Development Index* (HDI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap HDI di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017–2023. Penelitian ini menggunakan data panel dari 24 kabupaten/kota dan pendekatan kuantitatif dengan metode estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) yang dipilih berdasarkan hasil uji Chow dan Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap HDI di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Alokasi Anggaran Pendidikan, Alokasi Anggaran Kesehatan, *Human Development Index*

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

ABSTRACT

THE IMPACT OF BUDGET ALLOCATION IN THE EDUCATION AND HEALTH SECTORS ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH SULAWESI

By:

Zerlinda Salsabila; Anna Yulianita

In local financial management, education and health budget allocations are key to ensuring basic public services and represent direct investments in human development, as reflected in the Human Development Index (HDI). This study aims to analyze the impact of education and health budget allocations on HDI in South Sulawesi Province during the period 2017–2023. The study employs panel data from 24 districts and cities and uses a quantitative approach with the Fixed Effect Model (FEM) as the estimation method, selected based on the results of the Chow and Hausman tests. The findings indicate that education and health budget allocations have a significant effect on HDI in South Sulawesi.

Keywords: *Education Budget Allocation, Health Budget Allocation, Human Development Index*

*Acknowledge,
Head of the Department
of Development Economics*

Advisor



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dari mahasiswa:

Nama : Zerlinda Salsabila

NIM : 01021282126054

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Mata Kuliah : Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan
terhadap *Human Development Index* di Sulawesi Selatan

Telah kami periksa penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak

Indralaya, 15 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001



Dr. Hj. Anna Yulianita, S.E., M.Si
NIP. 197007162008012015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Zerlinda Salsabila
	NIM	0102121282126054
	Tempat, Tanggal Lahir	Sungailiat, 20 Juli 2003
	Alamat	Jln. Batin Tikal No.200B, gg. Nursalim, Sungailiat, Bangka Belitung
	No. Handphone	083163834099
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status Perkawinan	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi Badan	155 cm	
Berat Badan	60 kg	
<i>E-mail</i>	dzersalsa@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2009 - 2015	SD Muhammadiyah Sungailiat	
2015 - 2018	MTs Bahrul Ulum Islamic Centre Sungailiat	
2018 - 2021	SMA Negeri 1 Sungailiat	
2021 - 2025	S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN ORGANISASI/MAGANG		
2022- 2023	Staff Muda Keilmuan (KSPM FE UNSRI)	
2022-2023	Staff Muda Medinfo (IMEPA FE UNSRI)	
2023-2024	Staff Ahli Divisi Edukasi (KSPM FE UNSRI)	
2023-2024	Sekretaris Divisi Medinfo (IMEPA FE UNSRI)	
2023	Magang Bank Sumsel Babel Cab.Indralaya	
2024	Magang Bank BRI <i>Regional Office</i> Palembang	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori <i>Human Capital</i>	13
2.1.1.1 Teori <i>Human Capital</i> Menurut Schultz.....	13
2.1.1.2 Teori <i>Human Capital</i> Menurut Becker.....	16
2.1.1.3 Teori <i>Human Capital</i> Menurut Todaro dan Smith	18
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	21
2.1.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Menurut Adolf Wagner	21
2.1.2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah Menurut Keynes.....	24
2.2 Telaah Konseptual.....	26
2.2.1 <i>Human Development Index</i> (HDI)	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	32
2.4 Kerangka Pemikiran.....	36
2.5 Hipotesis Penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.2 Jenis dan Sumber Data	38
3.3 Definisi Operasional Variabel	38
3.4 Variabel Terikat (<i>Dependent Variable</i>).....	39
3.5 Variabel Bebas (<i>Independent Variable</i>).....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data	41
3.8 Metode Regresi Data Panel.....	42
3.8.1 <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	42
3.8.2 <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	42
3.8.3 <i>Random Effect Model</i> (REM).....	42
3.9 Pemilihan Metode Regresi Data Panel.....	43
3.9.1 Uji <i>Chow</i>	44
3.9.2 Uji <i>Hausman</i>	44
3.9.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	45
3.10 Uji Asumsi Klasik	45
3.10.1 Uji Multikolinieritas.....	46
3.10.2 Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.11 Uji Hipotesis Statistik	47
3.11.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	47
3.11.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	47
3.12 <i>Goodness of Fit</i>	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Penelitian	49
4.1.1 Profil Daerah	49
4.1.2 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi.....	51
Selatan.....	51
4.1.3 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi	
Selatan.....	56
4.1.4 Pertumbuhan <i>Human Development Index</i> (HDI) di Sulawesi Selatan	59
4.1.5 Statistik Deskriptif.....	62
4.2 Hasil Penelitian	64
4.2.1 Pemilihan Model	64
4.2.2 Estimasi Regresi Data Panel dengan <i>Fixed Effect Model</i>	65

4.2.3 Hasil Intersep di Sulawesi Selatan	66
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	69
4.2.5 Uji Hipotesis Statistik.....	70
4.2.6 <i>Goodness of Fit</i>	71
4.3 Pembahasan.....	72
4.3.1 Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan terhadap <i>Human Development Index</i> (HDI).....	72
4.3.2 Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan terhadap <i>Human Development Index</i> (HDI).....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Human Development Index (HDI) di Sulawesi Selatan Tahun	6
Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun	8
Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun.....	10
Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun	52
Tabel 4.2 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun.....	56
Tabel 4.3 Human Development Index (HDI) di Sulawesi Selatan Tahun	59
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif.....	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman	65
Tabel 4.7 Hasil Regresi Fixed Effect Model	65
Tabel 4.8 Hasil Intersep di Sulawesi Selatan	67
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas	69
Tabel 4.11 Hasil Uji F	70
Tabel 4.12 Hasil Uji t	70
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi (R^2)	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB	23
Gambar 2. 2 Model Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Selatan	50
Gambar 4.2 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi	54
Gambar 4.3 Pertumbuhan Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi	58
Gambar 4.4 Pertumbuhan Human Development Index (HDI) di Sulawesi	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Regresi	89
Lampiran 2 Statistik Deskriptif.....	93
Lampiran 3 Fixed Effect Model (FEM)	94
Lampiran 4 Random Effect Model (REM)	95
Lampiran 5 Common Effect Model (CEM).....	96
Lampiran 6 Hasil Intersep di Sulawesi Selatan.....	96
Lampiran 7 Uji Chow.....	97
Lampiran 8 Uji Hausman	98
Lampiran 9 Uji Multikolinieritas	98
Lampiran 10 Uji Heteroskedastisitas	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang membawa suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan demi mencapai tujuan kesejahteraan bersama (Hasibuan & Syahbudi, 2022). Menurut Todaro & Smith (2011), pembangunan harus dipahami sebagai proses yang bersifat multidimensi, yang mencakup reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada. Lubis et al. (2024) mencermati bahwa paradigma pembangunan yang berkembang saat ini menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang dinilai berdasarkan pembangunan manusia, yang kemudian diukur melalui kualitas hidup di setiap negara. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Menurut Owens (1987), hal terpenting adalah pembangunan manusia dan bukan pembangunan benda (*the development of people rather than the development of things*), karena nilai balik riil pembangunan manusia memberikan sumbangan lebih daripada pembangunan benda (fisik) (Bukhari, 2018).

Fokus utama dalam seluruh upaya pencapaian keberhasilan pembangunan adalah keberadaan manusia. Konsep dasar pembangunan manusia dijelaskan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* (HDR), dinyatakan bahwa “Manusia adalah kekayaan bangsa yang

sesungguhnya”. Menurut UNDP, salah satu cara untuk mengukur kualitas modal manusia di suatu negara adalah melalui *Human Development Index* (HDI) (Anantika & Sasana, 2020). HDI menentukan apakah suatu negara tergolong maju, berkembang, atau tertinggal, serta mengukur dampak pembangunan ekonomi terhadap kualitas hidup masyarakatnya. HDI menyediakan ukuran gabungan yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (i) umur panjang dan hidup sehat (*life expectancy at birth*); (ii) pengetahuan, yang diukur melalui tingkat melek huruf orang dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (*mean years of schooling*); serta (iii) standar hidup layak yang diukur berdasarkan daya beli (*purchasing power parity*) (Mahulauw et al., 2016). Garibaldi (2015) menyatakan bahwa kriteria ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi suatu negara serta kualitas masyarakatnya.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen fundamental yang berperan penting dalam menentukan tingkat kemajuan dan pembangunan suatu negara. SDM yang berkualitas memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran dengan lebih baik. Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Melalui kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai fungsi pemerintahan, yang mencakup tahapan perencanaan hingga pelaksanaan anggaran secara mandiri dan bertanggung jawab (Andreas & Umam, 2022). Anggaran pemerintah daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang berisi rincian pendapatan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran tahunan.

Menurut Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, paling sedikit 10 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pembiayaan sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2023) dalam rancangan kebijakan umum terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah ini dicantumkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dua sektor utama yang menjadi bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa penganggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mencakup urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, fungsi, dan jenis belanja. Fungsi belanja daerah mencakup fungsi layanan dasar, seperti fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan, tanpa mencantumkan indeks daya beli sebagai objek belanja langsung. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) bahwa Indeks daya beli masyarakat merupakan indikator tidak langsung yang menunjukkan kesejahteraan ekonomi, dan digunakan dalam penghitungan garis kemiskinan serta

pengambilan kebijakan sosial ekonomi. Berbeda dengan pendidikan dan kesehatan yang memiliki alokasi anggaran langsung dalam struktur belanja pemerintah daerah, Indeks daya beli tidak dialokasikan secara langsung dalam APBD. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Becker (1993) bahwa pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi Sumber Daya Manusia karena memberikan hasil (*return*) di masa depan layaknya investasi pada aset fisik.

HDI menjadi standar global, dengan fokus pembangunan yang bergeser dari peningkatan pendapatan menuju pembangunan manusia yang lebih menyeluruh. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa HDI di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 74,39 persen meningkat 0,84 persen dari tahun sebelumnya. Menurut data UNDP tahun 2023, HDI Indonesia masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Malaysia (80,3 persen) dan Singapura (93,9 persen).

Kesenjangan pencapaian HDI terlihat antar daerah di Indonesia, termasuk di Kawasan Timur Indonesia, yang dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur. Selama beberapa dekade, pembangunan nasional cenderung terpusat di wilayah barat, tercermin dari rata-rata HDI yang lebih tinggi dibandingkan wilayah timur. Berdasarkan data BPS tahun 2023, rata-rata HDI di wilayah barat Indonesia mencapai lebih dari 75 persen, sementara wilayah timur sebagian besar masih berada pada kategori sedang dengan nilai di bawah 70 persen. Kondisi ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan publik, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Salah satu provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat serta capaian HDI yang tergolong tinggi adalah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia timur, yakni lebih dari 9 juta jiwa. Meskipun memiliki populasi yang besar, provinsi ini berhasil mencapai kategori HDI tinggi sebesar 73,46 persen. Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen tinggi terhadap komponen-komponen HDI, seperti sektor pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan anggaran yang meningkat.

Selama lima tahun terakhir, pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami kemajuan pesat, terutama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kota di Sulawesi Selatan yang termasuk kota dengan SDM paling maju di Indonesia, menurut data BPS, adalah Kota Makassar, yang meraih peringkat ke-6 yaitu sebesar 84,85 persen. Meskipun telah tercapai kemajuan tersebut, masih terdapat disparitas dalam pengembangan SDM antarwilayah di Sulawesi Selatan, seperti Kabupaten Jeneponto yang menunjukkan pertumbuhan HDI terendah dengan rata-rata pertumbuhan HDI hanya mencapai 64,77 persen selama lima tahun terakhir.

Data HDI di Sulawesi Selatan periode 2019-2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut.

Tabel 1.1 *Human Development Index (HDI)* di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Angka Indeks)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1	Bantaeng	68,30	68,73	68,99	69,69	70,57	69,26
2	Barru	70,60	71,00	71,13	71,53	72,36	71,32
3	Bone	65,67	66,06	66,40	67,01	67,81	66,59
4	Bulukumba	68,28	68,99	69,62	70,34	71,21	69,69
5	Enrekang	72,66	72,76	72,91	73,39	73,89	73,12
6	Gowa	69,66	70,14	70,29	70,99	71,57	70,53
7	Jeneponto	64,00	64,26	64,56	65,13	65,90	64,77
8	Luwu	70,39	70,51	70,85	71,36	72,16	71,05
9	Luwu Utara	69,46	69,57	70,02	70,51	71,34	70,18
10	Maros	69,50	69,86	70,41	71,00	71,63	70,48
11	Pangkajene dan Kepulauan	68,29	68,72	69,21	69,79	70,59	69,32
12	Palopo	77,98	78,06	78,38	78,91	79,45	78,56
13	Luwu Timur	72,80	73,22	73,34	73,92	74,35	73,53
14	Pinrang	71,12	71,26	71,45	71,97	72,84	71,73
15	Sinjai	67,05	67,60	67,75	68,33	68,92	67,93
16	Kepulauan Selayar	66,91	67,38	67,76	68,35	69,20	67,92
17	Sindereng Rappang	71,05	71,21	71,54	72,06	72,71	71,71
18	Soppeng	68,26	68,67	68,99	69,70	70,58	69,24
19	Takalar	66,94	67,31	67,72	68,31	68,90	67,84
20	Tana Toraja	68,25	68,75	69,49	69,88	70,73	69,42
21	Wajo	69,05	69,15	69,62	70,26	71,10	69,84
22	Parepare	77,62	77,86	78,21	78,54	79,03	78,25
23	Makassar	82,25	82,25	82,66	83,12	83,52	82,76
24	Toraja Utara	69,23	69,33	69,75	70,36	71,23	69,98
25	Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	72,82	73,46	72,42

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, HDI di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan rata-rata HDI meningkat dari 71,66 menjadi 73,46. Pada tahun 2023, HDI tertinggi di Sulawesi Selatan masih dipegang oleh Kota Makassar dengan nilai 83,52, diikuti oleh Kota Palopo (79,45) dan Kota Parepare (79,03). Ketiga kota ini menunjukkan capaian HDI yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Selama periode 2022-2023, Kabupaten Bone mengalami peningkatan status dari HDI sedang menjadi tinggi. Sebagian besar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 20 kabupaten, berada dalam kategori HDI tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Muliza *et al.* (2017) mengemukakan bahwa untuk menciptakan SDM yang berkualitas, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya membangun SDM yang berkualitas. Untuk mendorong pembangunan yang merata, pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berperan penting sebagai modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Pendidikan memerlukan alokasi belanja pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana, serta investasi dalam modal manusia. Modal manusia adalah modal produktif pada individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Tingginya alokasi belanja pemerintah di sektor pendidikan berpotensi memberikan dampak positif terhadap capaian pembangunan (Mongan, 2019). Alokasi anggaran pendidikan yang memadai untuk pengembangan kualitas guru, fasilitas belajar, dan program beasiswa diperlukan agar seluruh penduduk dapat mengakses pendidikan yang layak (Juita *et al.*, 2024).

Data alokasi anggaran sektor pendidikan di Sulawesi Selatan periode 2019-2023 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1	Bantaeng	90,61	91,65	109,61	117,45	107,29	95,52
2	Barru	84,72	85,91	91,33	110,72	115,16	92,79
3	Bone	305,33	275,76	274,04	362,66	393,85	302,40
4	Bulukumba	142,15	168,64	166,38	194,51	215,19	167,38
5	Enrekang	126,55	118,94	146,27	153,00	146,76	125,67
6	Gowa	193,20	205,25	210,58	282,13	252,54	211,79
7	Jeneponto	161,28	136,13	134,33	170,94	161,14	133,90
8	Luwu	167,68	147,72	147,49	195,91	193,21	152,06
9	Luwu Utara	114,93	107,31	122,53	136,66	151,11	114,54
10	Maros	110,24	114,95	135,79	168,35	174,97	131,00
11	Pangkajene dan Kepulauan	131,08	119,91	129,26	185,47	212,43	145,40
12	Palopo	65,10	61,00	86,53	95,53	83,69	70,40
13	Luwu Timur	63,40	81,23	91,17	115,26	114,57	82,12
14	Pinrang	119,11	132,02	125,63	201,12	178,38	142,59
15	Sinjai	113,94	111,88	139,09	161,60	142,81	125,70
16	Kepulauan Selayar	103,63	84,32	85,60	98,86	102,53	86,98
17	Sindereng Rappang	177,04	133,69	145,31	168,36	146,83	143,22
18	Soppeng	141,27	153,05	163,68	171,65	136,56	141,65
19	Takalar	105,15	95,79	126,92	162,67	145,87	119,87
20	Tana Toraja	93,59	98,64	107,83	142,07	139,27	109,00
21	Wajo	156,19	195,22	183,46	221,86	211,13	179,55
22	Parepare	64,54	63,58	61,85	80,44	87,83	67,45
23	Makassar	281,82	267,29	243,81	424,22	412,88	307,40
24	Toraja Utara	91,24	87,28	97,82	154,51	141,83	104,85
25	Sulawesi Selatan	3.203,81	3.137,17	3.326,29	4.275,94	4.167,84	3.353,24

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.2, Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan di Sulawesi Selatan dari tahun 2019-2023, menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir dengan rata-rata Rp3.353,24 miliar. Pada tahun 2019 sebesar Rp3,203 miliar mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.137,17 miliar. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar Rp3.326,29 miliar dan 2022 sebesar Rp4.275,94 miliar, namun pada tahun 2023 justru mengalami penurunan yaitu sebesar Rp4.167,84 miliar. Kota Makassar secara menerima alokasi anggaran terbesar, dengan rata-rata sebesar Rp326 miliar. Hal ini mencerminkan peran Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan pendidikan di Sulawesi Selatan. Berbeda

dengan Kota Parepare yang menerima alokasi terkecil dengan rata-rata Rp71,6 miliar.

Selain sektor pendidikan, salah satu sektor utama yang berkontribusi pada peningkatan HDI adalah sektor kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu beraktivitas secara optimal. Alokasi anggaran kesehatan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta peningkatan kualitas layanan. Akses yang baik terhadap layanan kesehatan memungkinkan masyarakat memperoleh pengobatan secara tepat, sehingga meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Peningkatan ini pada akhirnya turut mendorong peningkatan nilai HDI (Wahyuni & Amar, 2023).

Sektor kesehatan diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) yang mencerminkan rata-rata usia hidup sejak lahir. Nilai AHH yang tinggi menunjukkan akses layanan kesehatan yang baik dan keberhasilan dalam menurunkan angka kematian. Karena berkontribusi langsung terhadap kualitas hidup, peningkatan AHH menjadi prioritas dalam pembangunan untuk mendorong kenaikan HDI (Handayani *et al.*, 2016). Pentingnya sektor kesehatan telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.

Data alokasi anggaran sektor kesehatan di Sulawesi Selatan periode 2019–2023 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Alokasi Anggaran Sektor Kesehatan di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1	Bantaeng	89,01	50,44	74,03	47,20	24,77	57,52
2	Barru	49,78	41,02	37,25	69,15	31,15	40,82
3	Bone	68,49	108,91	131,39	108,74	96,99	85,63
4	Bulukumba	37,76	77,54	132,12	52,79	46,61	58,06
5	Enrekang	36,29	53,48	57,86	38,46	72,31	48,09
6	Gowa	76,10	104,82	157,03	76,54	83,09	94,47
7	Jeneponto	48,06	64,56	90,00	42,21	39,94	54,78
8	Luwu	48,64	90,64	57,27	46,53	44,89	51,01
9	Luwu Utara	34,45	62,74	86,08	85,81	48,44	56,48
10	Maros	44,40	51,40	52,50	77,01	44,91	50,79
11	Pangkajene dan Kepulauan	42,81	63,06	53,39	98,78	50,41	58,41
12	Palopo	41,38	84,37	79,73	40,28	34,22	45,31
13	Luwu Timur	33,92	42,65	72,37	54,38	32,17	46,54
14	Pinrang	38,98	57,50	63,93	116,44	47,92	57,19
15	Sinjai	64,82	90,20	130,78	40,05	42,45	65,19
16	Kepulauan Selayar	26,13	61,93	85,59	122,47	90,48	70,26
17	Sindereng Rappang	38,62	56,08	96,33	67,33	32,88	55,02
18	Soppeng	35,52	49,99	90,66	58,50	27,77	50,18
19	Takalar	64,84	59,97	37,47	75,52	44,10	51,96
20	Tana Toraja	62,62	59,45	82,38	78,41	62,26	59,77
21	Wajo	47,19	61,33	85,41	99,47	36,29	62,46
22	Parepare	27,70	23,24	35,82	59,54	27,31	30,14
23	Makassar	52,78	51,19	82,61	53,66	67,16	54,09
24	Toraja Utara	52,62	59,61	60,41	48,22	48,59	47,16
25	Sulawesi Selatan	1.162,91	1.526,13	1.932,42	1.657,49	1.177,12	1.351,35

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024)

Berdasarkan Tabel 1.3, alokasi anggaran sektor kesehatan di Sulawesi Selatan periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi, dengan rata-rata tahunan Rp1,49 triliun. Alokasi terendah terjadi pada 2019 sebesar Rp1,16 triliun yang kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp1,52 triliun. Pada tahun 2021 mencatat alokasi tertinggi Rp1,93 triliun, sementara pada tahun 2022 sebesar Rp1,65 triliun dan tahun 2023 sebesar Rp1,17 triliun mengalami penurunan. Kabupaten Bone menerima rata-rata alokasi tertinggi Rp102,9 miliar,

menunjukkan prioritas pada layanan kesehatan. Berbeda dengan Kota Parepare yang menerima rata-rata alokasi terendah Rp34,7 miliar.

Berdasarkan uraian diatas, secara aturan hukum, alokasi anggaran daerah untuk sektor pendidikan dan kesehatan diatur secara tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD untuk pendidikan, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menetapkan minimal 10 persen dari APBD untuk kesehatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 juga menegaskan bahwa penganggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi dan fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tanpa menyebutkan indikator daya beli sebagai bagian dari belanja langsung.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, alokasi anggaran ini merupakan bagian utama dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan memastikan terselenggaranya pelayanan dasar secara optimal. Pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai investasi langsung dalam pembangunan manusia yang secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas SDM sebagai faktor penentu pembangunan yang kemudian diukur melalui HDI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dianalisis adalah bagaimana pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap *Human Development Index* (HDI) di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap *Human Development Index* (HDI) di Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Teori *Human Capital* dan Teori Pengeluaran Pemerintah menurut Adolf Wagner dan Keynes, serta konsep HDI. Fokus penelitian ini adalah pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap HDI, terutama dalam bidang Ekonomi Keuangan Daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis tentang pengaruh alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap HDI, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengkaji peran alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Muhtarom. (2016). Pengembangan Jumlah Nilai Produksi dan Jumlah Nilai Investasi sebagai Peningkatan dalam Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur. *Jurnall Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 83–92.
- Anantika, D. A., & Sasana, H. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Korupsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Negara APEC. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(3), 168–178. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Andiny, P., & Sari, M. G. P. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2(2), 116–125. <http://scholar.unand.ac.id/39279/>
- Andreas, N., & Umam, K. (2022). Pengelolaan Keuangan Daerah: Pilar Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. <https://dprd.sumenepkab.go.id/pengelolaan-keuangan-daerah-pilar-pembangunan-yang-transparan-dan-akuntabel>
- Ardiningrum, L. R., Junaidi, & Umiyati, E. (2021). Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 10(2), 59–68. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i2.13402>
- Asrahmaulyana. (2022). Perubahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Kemiskinan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(1), 456–469. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.3380>
- Aulia, G. R. N., Daeng, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan Pendapatan Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Mataram Tahun 2012-2021. *Jurnal Oportunitas Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.548>
- Azfirmawarman, D., Magriast, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(5), 117–125.
- Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia Tahun 2013-2014. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Profil Provinsi Sulawesi Selatan. *BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://sulsel.bpk.go.id/profil-provinsi-sulawesi-selatan/#:~:text=Provinsi Sulawesi Selatan terletak di,wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Jakarta: BPS*. <https://www.bps.go.id/publication.html>
- Becker, G. S. (1993). Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. In *Notes and Queries*, s1-IV(92).
- BPS. (2024a). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa). *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://sulsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2024b). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha. *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan*, 10.
- BPS, (Badan Pusat Statistik). (2023a). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jakarta*.
- BPS, (Badan Pusat Statistik). (2023b). Statistik Pendidikan Indonesia. *Jakarta*.
- Breton, T. R. (2014). A Human Capital Theory of Growth: New Evidence for an Old Idea. In *SSRN Electronic Journal* (Issue 14). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2456903>
- Bukhari, A. (2018). Islam dan Pembangunan Manusia di Era Globalisasi. *Jurnal Transformatif*, 2(1), 1–16.
- Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*, 082465, 1–16. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196151/pp-no-4-tahun-2022>
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2024). Sarana Transportasi Laut. *DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan*. [https://dpmptsp.sulselprov.go.id/assets/profil/39302Sarana Transportasi Laut.pdf?utm_source](https://dpmptsp.sulselprov.go.id/assets/profil/39302Sarana%20Transportasi%20Laut.pdf?utm_source)
- Dinas Pendidikan Bone. (n.d.). Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS, Ini 3 Instruksi Disdikbud Bone Dalam Penyusunan RKAS Tahun 2023. *Lintas Celebes*. <https://lintascelebes.com/2023/02/sosialisasi-petunjuk-teknis-bos-ini-3-instruksi-disdikbud-bone-dalam-penyusunan-rkas-tahun-2023/#:~:text=Yang Pertama%2C kata dia%2C dalam,dari Dinas%2C> jelas Fajaruddin.

- DINKES. (2023). Laporan Kinerja Tahun 2023. *Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. [http://103.74.164.161:8107/632/1/LKJ Ditgun 2023_final %281%29.pdf](http://103.74.164.161:8107/632/1/LKJ%2023_final%281%29.pdf)
- DPRD. (2016). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan. *DPRD Provinsi Sulawesi Selatan*. https://dprd.sulselprov.go.id/web/assets/uploads/regulasi/5ee33d0e5fb803687edd5ed50f3b9498.pdf?utm_source
- Endra. (2021). Program Home Care – Home Visit Upaya Mudahkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. *Fajar.Co.Id*. <https://sulsel.fajar.co.id/2021/04/18/program-home-care-home-visit-upaya-bupati-asa-mudahkan-pelayanan-kesehatan-masyarakat/>
- Garibaldi, M. (2015). Analisis Hubungan IPM Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 562–572.
- Ghozali, I., & Dwi, R. (2018). Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, konsep dan Aplikasi dengan Eviews 10. *Edisi 2. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Ginting, D. I., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup dan Harapan Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Bisnis Net*, 6(2), 519–528. <https://doi.org/10.46576/bn.v6i2.3884>
- Gujarati, D. N. (2012). Ekonometrika Dasar (5th ed.). *McGraw-Hil*.
- Handayani, N. S., Bendesa, I. K. ., & Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan PDRB Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449–3474.
- Hasanuddin, M. (2024). BPS: Indeks pembangunan manusia di Sulsel meningkat pada 2024. *Kompas.Com*. <https://makassar.antaranews.com/berita/573849/bps-indeks-pembangunan-manusia-di-sulsel-meningkat-pada-2024>
- Hasibuan, S. A., & Syahbudi, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Medan Tahun 2017-2021. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 7(4), 1158–1166.
- HRNews. (2023). *Palopo Raih 3 Penghargaan Bidang Kesehatan*. <https://hrnews.id/palopo-raih-3-penghargaan-bidang-kesehatan/>
- Ishak. (2022). *Tantangan Layanan Kesehatan di Wilayah Pedesaan*. Data Transformation Indonesia. https://digitaltransformation.co.id/tantangan-layanan-kesehatan-di-wilayah-pedesaan/?utm_source

- Juita, D. P., Priya, Azwardi, M., & Amra, A. (2024). Pentingnya Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Lembaga Pendidikan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3068–3077. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1243>
- Kementerian Perhubungan. (2024). Informasi Bandar Udara. *Direktorat Jenderal Perhubungan Udara*. <https://hubud.kemenuh.go.id/hubud/website/bandara/226>
- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. In *Journal of the American Statistical Association* (Vol. 31, Issue 196). <https://doi.org/10.2307/2278703>
- Kolinug, F. C., & Mawitjere, P. S. (2023). Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pada Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 1(4), 01–09. <https://doi.org/10.61132/jepi.v1i4.256>
- Kuncoro, M. (2019). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ke 3. *Jakarta: Erlangga*.
- Lubis, C. K. S., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 738–755.
- Madany, N., Ruliana, & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Ixq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variensiunm28>
- Mahulauw, A., Santosa, D., & Mahardika, P. (2016). Pengaruh Pengeluaran Kesehatan, Pendidikan, serta Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 122–148.
- Mangkoesebroto, G. (2018). Ekonomi Publik. *Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta*.
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh Pengeluaran Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jalan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau Tahun 2006–2019. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>

- Muhammad Fajar. (2021). Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Formulasi Baru. *STATISTIKA Journal of Theoretical Statistics and Its Applications*, 21(2), 125–135. <https://doi.org/10.29313/statistika.v21i2.331>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.28950>
- Napitupulu, R. B. Simanjuntak, T. P. Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., Tobing, L., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS - STATA - Eviews. 1 ed. *Madenatera*.
- Nasution, A. R., Simanjuntak, Y., Handani, T., & Benediktus, R. (2025). Analisis Efisiensi Pengeluaran Publik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(2), 3504–3510.
- Owens, E. (1987). The Future of Freedom in Developing World: Economic Development and Political Reform. *New York: Pergamon Press*.
- Pangestika, S. (2015). Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). *Universitas Negeri Semarang*.
- Pemerintah Kota Makassar. (n.d.). *Kadisdik Makassar Bahas Pendidikan Inklusif di Rakor Evaluasi Kebijakan Nasional*. <https://makassarkota.go.id/2024/11/kadisdik-makassar-bahas-pendidikan-inklusif-di-rakor-evaluasi-kebijakan-nasional/#:~:text=Ia juga memaparkan salah satu,dan para pemangku kepentingan pendidikan.>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Kebijakan Umum anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/content/uploads/Kebijakan_Umum_Anggaran_Pendapatan_Dan_Belanja_Daerah_Pemerintah_Provinsi_Sulawesi_Selatan_Tahun_Anggaran_2023.pdf
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Permatasari, A. D., Asmara, K., Bachtir, A., & Sandi, P. M. (2024). Analisis

- Pengaruh Rata Rata Lama Sekolah, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 168–180.
- Sari, A. I. C., A'ini, Z. F., & Tukiran, M. (2022). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 127–136.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *American Economic Review*, 51, 1–17.
- Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 01–11. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878>
- Siregar, R. (2019). Tantangan Pendidikan Terpencil Lokasi Perdesaan di Indonesia. *Jurnal Edukatif*, 2(2), 201–207.
- Sudjana, D., & Ibrahim, E. (2020). Statistika Deskriptif dan Inferensial (Edisi 2). Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna, V. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development. Thirteenth Edition. In *Pearson* (Issue 13th Edition). <https://www.mkm.ee/en/objectives-activities/economic-development>
- UNDP. (1990). Global Human Development Report. *United Nations Development Programme*.
- Wahyuni, A., & Amar, S. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2020. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 29–36.

<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index>

- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, edisi kedua. *Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia*.
- Widodo. (2019). *Metode Penelitian Populer dan Praktis. 1st Ed. Jakarta: Rajawali Pers*.
- Yasinta, B. L. (2018). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Infrastruktur, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat Tahun 2008-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*.
- Yektiningsih, E. (2018). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 18(2), 32–50. <https://doi.org/10.30742/jisa1822018528>
- Yuliana, A., Syahril Basri, M., Nur Rahmah, S., & Adi Nohe, D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur dengan Regresi Data Panel. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 177–195.